RENSTRA
TAHUN 2025-2029



KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN NGANJUK



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan terbitnya Radiogram Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 Februari 2025, nomor 100.2.1.3/644/SJ hal tentang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Serentak Tahun 2025, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, akan dimulai penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Hubungan antara Renstra Kecamatan Sukomoro dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.1 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang PedomanPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya
d. Kelompok Sasaran Layanan;
e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;
f. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah;
g. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah;

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Darah
a. Identifikasi Permasalahan;
b. Perumusan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

Kecamatan Sukomoro memiliki luas wilayah 3.752,74 Ha dengan Desa yang terjauh dari Kecamatan Sukomoro adalah Desa Ngrengket yaitu 4 Km dengan ketinggian dari permukaan laut 52 m dengan curah hujan rata-rata per tahun 485 mm.

Secara administratif, Kecamatan Sukomoro terdiri dari 12 desa/Kelurahan yaitu:

1. Desa Sumengko
2. Desa Blitaran
3. Desa Kedungsoko
4. Desa Nglundo
5. Desa Bungur
6. Desa Ngrami
7. Desa Bagorwetan
8. Desa Putren
9. Desa Ngrengket
10. Desa Pehserut
11. Kelurahan Kapas
12. Kelurahan Sukomoro

Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

LUAS WILAYAH KECAMATAN SUKOMORO PER DESA

No	Desa	Luas (Ha)
1.	Sumengko	513
2.	Blitaran	151
3.	Kedungsoko	286
4.	Nglundo	246
5.	Bungur	274
6.	Ngrami	373
7.	Bagorwetan	380
8.	Putren	409
9.	Ngrengket	292
10.	Pehserut	213
11.	Kapas	349
12.	Sukomoro	188
	Jumlah	3539

Secara geografis Kecamatan Sukomoro berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gondang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjunganom
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loceret
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Nganjuk

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Sukomoro

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sumengko	1.282	1.250	2.532
2	Blitaran	737	739	1.476
3	Kedungsoko	887	848	1.735
4	Nglundo	1.853	1.920	3.773
5	Bungur	584	558	1.142
6	Ngrami	397	398	795
7	Bagorwetan	1.005	1.023	2.028

8	Putren	1.187	1.157	2.344
9	Ngrengket	832	783	1.615
10	Pehserut	922	907	1.829
11	Kapas	965	964	1.929
12	Sukomoro	965	964	1.929
	Jumlah Penduduk	10.651	10.547	21.198

Sumber data : Kecamatan Sukomoro Dalam Angka Tahun 2024

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Sukomoro.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

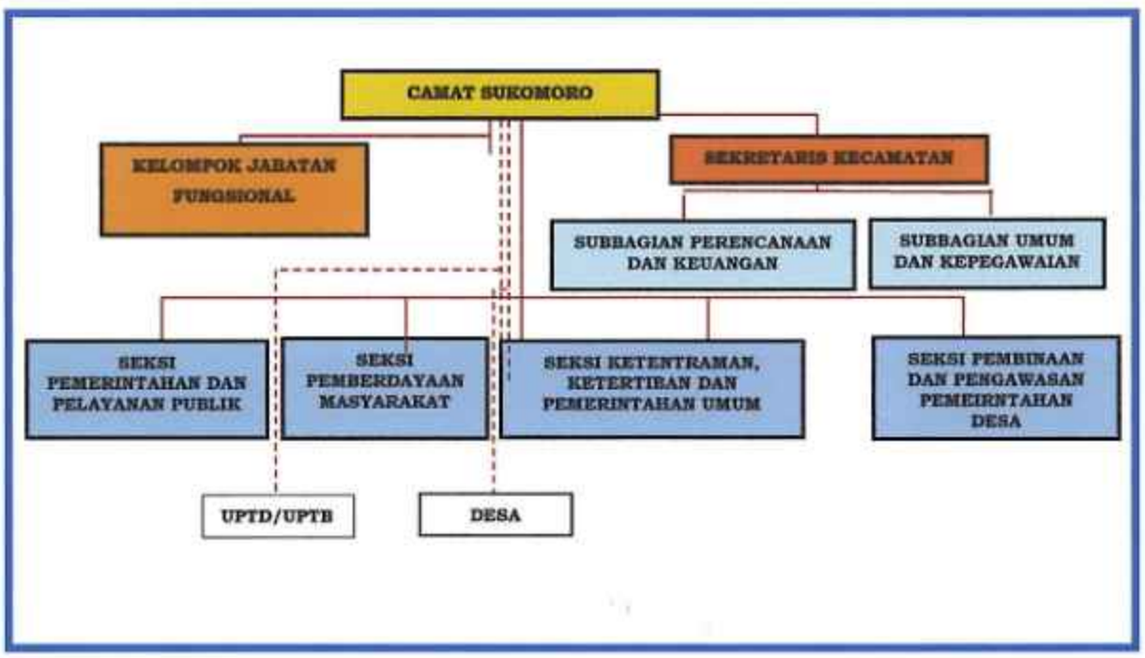
   a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
   c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
   e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
   f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
   h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan

i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Sukomoro adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;

c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

2. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Sukomoro adalah sebagai berikut:

1.1 Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Sukomoro sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 4 (empat) jabatan struktural dan 4 (empat) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 7 (tujuh) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pegawai Pada Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3.	Kepala Seksi	4	-	4
4.	Kasubbag	-	1	1
5.	Pelaksana/PNS	3	-	3
6.	Non ASN	4	-	4
Jumlah		13	1	14

1.2 Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Sukomoro sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai Pada Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b	1	-	1
2.	Pembina	IV/a	-	-	-
3.	Penata Tingkat I	III/d	5	-	5
4.	Penata	III/c	-	-	-
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	-	1	1
6.	Penata Muda	III/a	2	-	2
6.	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
7.	Pengatur	II/c	-	-	-
8.	Pengatur Muda	II/a	1	-	1
Jumlah			9	1	10

1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Sukomoro dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	0	-	0
2.	S1	6	1	7
3.	SMA	3	-	3
	JUMLAH	9	1	10

1.4. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
     - 1 unit mobil avanza velos Tahun 2024
   - Roda dua sebanyak 2 (dua) unit yaitu :
     - Honda Supra X125 Tahun 2007
     - Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
   - Meja Kerja : 34 buah
   - Meja layanan : 1 buah
   - Kursi : 50 buah
   - Kursi Tunggu : 2 buah
   - Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
   - Komputer : 6 (enam) unit
   - Laptop : 5 (lima) unit
   - Mesin Ketik : 2 (dua)
   - Printer : 8 (delapan) unit
   - TV : 3 (tiga) unit
   - Kursi Sofa : 1 (satu) unit
   - Kursi Tamu : 1 (satu) unit

b. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukomoro dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sukomoro
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Sukomoro
3. Meningkatnya tertib Administrasi Desa di Kecamatan Sukomoro

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai SAKIP Kecamatan				66	68	70	N/A	50.42	60.85	73.35	N/A	76	89	104	N/A
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan				84	86	88	90	100	100	100	91,66	119,04	116,27	113	101,84
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan				84	86	88	90	100	100	100	85,71	119,04	116,27	90,90	95,23
4	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan				84	86	88	90	100	100	100	100	119,04	116,27	113	100
5	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan				84	86	88	90	100	100	100	100	119,04	116,27	113	100
6	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				84	86	88	100	81	81	81	100	119,04	116,27	81	100

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				92	92	93	94,64	-	-	102,86		
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan				10	10	10	14,29	-	-	143%		

Sumber: Laporan Evaluasi Renja PD Tahun 2024

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,384,193,700	2,367,239,393	2,414,584,715	2,236,902,076	-	-	93.82%	-	-		
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,662,800	72,974,800	74,434,600	84,483,382	-	-	83.93%	-	-		
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	188,411,520	55,544,600	56,656,400	165,614,810	-	-	87.90%	-	-		
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	93,964,600	66,621,800	67,953,800	85,557,000	-	-	91.05%	-	-		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125,164,650	87,607,000	89,359,000	121,980,000	-	-	97.46%	-	-		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	251,696,000	205,808,500	209,923,500	214,924,100	-	-	85.39%	-	-		

Sumber: Evaluasi Renja 2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.1., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target sudah terpenuhi semua. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Sukomoro.

Sedangkan pada table 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2024, rasio antara anggaran dan realisasi pada predikat Tinggi dan sangat Tinggi tidak ada yang rendah bahkan sangat rendah. Hal ini bisa terjadi karena kerjasama yang baik dari semua pegawai.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Sukomoro

No	Desa	PAUD/ TK	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/ Pamong Belajar	Perpustakaan
1	Sumengko	5	4	1	1	-	1	-	-	-
2	Blitaran	1	4	1	1	-	1	-	-	-
3	Kedungsoko	5	5	1	-	-	1	-	-	-
4	Nglundo	3	3	-	-	-	-	-	-	-
5	Bungur	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Ngrami	1	3	-	1	-	-	-	-	-
7	Bagorwetan	2	2	-	-	-	-	-	-	-
8	Putren	1	-	-	1	-	1	-	-	-
9	Ngrengket	2	4	1	-	-	2	-	-	-
10	Pehserut	1	2	-	-	-	-	-	-	-
11	Kapas	3	4	1	-	-	1	-	-	-
12	Sukomoro	2	4	1	-	-	2	-	-	-
	JUMLAH	25	32	5	4	-	7	-	-	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sukomoro

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Sumengko	-	-	-	-	1	-
2	Blitaran	-	-	-	1	1	-
3	Kedungsoko	-	1	-	-	1	1
4	Nglundo	-	-	-	-	1	-
5	Bungur	-	-	-	-	1	-
6	Ngrami	-	-	-	-	1	-
7	Bagorwetan	-	-	1	1	1	1
8	Putren	-	-	-	-	1	-
9	Ngrengket	-	-	-	-	1	-
10	Pehserut	-	-	-	-	1	-
11	Kapas	-	-	-	1	1	-
12	Sukomoro	-	-	-	1	1	-
	JUMLAH	-	1	1	3	11	1

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Sukomoro

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	Sumengko	36	6	8	9	4	7	32
2	Blitaran	20	4	5	9	11	13	32
3	Kedungsoko	60	21	9	9	9	18	31
4	Nglundo	19	8	7	9	5	9	62
5	Bungur	13	7	5	9	2	9	30
6	Ngrami	27	10	9	10	5	9	36
7	Bagorwetan	15	8	5	9	4	8	33
8	Putren	2	1	5	7	1	7	31
9	Ngrengket	33	5	9	10	5	25	25
10	Pehserut	16	4	5	7	3	27	31
11	Kapas	12	8	9	10	7	20	32
12	Sukomoro	27	10	9	10	5	9	36
	JUMLAH	253	82	76	98	56	152	375

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Sukomoro

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	Sumengko	1	-	-	-	1	-
2	Blitaran	1	-	-	-	1	-
3	Kedungsoko	1	-	-	-	1	-
4	Nglundo	1	-	-	-	1	-
5	Bungur	1	-	-	1	1	-
6	Ngrami	1	-	-	-	1	-
7	Bagorwetan	1	-	1	1	1	-
8	Putren	1	-	-	-	1	-
9	Ngrengket	1	1	-	1	1	-
10	Pehserut	1	-	-	-	1	-
11	Kapas	1	-	-	-	1	-
12	Sukomoro	1	-	-	-	1	-
	JUMLAH	12	1	1	3	11	-

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Sukomoro

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Sumengko	-	2	1	1
2	Blitaran	-	1	1	2
3	Kedungsoko	1	1	1	3
4	Nglundo	-	1	1	3
5	Bungur	-	1	1	2
6	Ngrami	-	1	1	3
7	Bagorwetan	-	2	1	3
8	Putren	1	1	1	2
9	Ngrengket	-	1	1	2
10	Pehserut	1	1	1	3
11	Kapas	-	1	1	3
12	Sukomoro				
	Jumlah	3	13	11	27

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Sukomoro Tahun 2024

No	Desa	Anjal/gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1	Sumengko	-	-	-	-	-	-	-
2	Blitaran	-	-	-	-	-	-	-
3	Kedungsoko	-	-	-	-	-	-	-
4	Nglundo	-	-	-	-	-	-	-
5	Bungur	-	-	-	-	-	-	-
6	Ngrami	-	-	-	-	-	-	-
7	Bagorwetan	-	-	-	-	-	-	-
8	Putren	-	-	-	-	-	-	-
9	Ngrengket	-	-	-	-	-	-	-
10	Pehserut	-	-	-	-	-	-	-
11	Kapas							
12	Sukomoro	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Sukomoro Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Sukomoro
	Kec. Sukomoro	2

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Sukomoro Tahun 2024

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)
1	Sumengko	1	1	1	1	1	1	-	-
2	Blitaran	1	1	1	1	1	1	-	-
3	Kedungsoko	1	1	1	1	1	1	-	-
4	Nglundo	1	1	1	1	1	1	-	-
5	Bungur	1	1	1	1	1	1	-	-
6	Ngrami	1	1	1	1	1	1	-	-
7	Bagorwetan	1	1	1	1	1	1	-	-
8	Putren	1	1	1	1	1	1	-	-
9	Ngrengket	1	1	1	1	1	1	-	-
10	Pehserut	1	1	1	1	1	1	-	-
11	Kapas	1	1	1	1	1	1	-	-
12	Sukomoro	1	1	1	1	1	1	-	-
	JUMLAH	12	11	11	11	11	11	-	-

Sumber Data : Seksi BinwasDes

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Sukomoro Tahun 2024

No.	Jenis pelayanan	Tahun 2024
	Adminduk capil	456
	Perijinan	12
	Administrasi lainnya	16

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan public

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Sukomoro Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Kecamatan Sehat	1
2	Kecamatan Layak Anak	1
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	2
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	4
6	Kemiskinan	2

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

DATA DAN INFORMASI

Penjelasan Metadata Terkait Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukomoro merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sukomoro dalam menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Strategis Renstra serta Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan. Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Nganjuk.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukomoro adalah meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima yang memiliki indikator Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan ditunjang oleh 3 (dua) sasaran yaitu, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sukomoro, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Sukomoro, Meningkatnya tertib Administrasi Desa di Kecamatan Sukomoro

Tabel Metadata Indikator Kinerja

NO.	INDIKATOR KINERJA	METADATA
1	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	- Konsep: Aplikasi SINCAN - Definisi: Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk, meliputi penilaian Administrasi, penilaian Presentasi, dan penilaian Tinjau Lapang dalam rangka untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan 7 aspek peniaian - Ukuran: Indeks - Satuan: Nilai - Klasifikasi: - - Rumus Perhitungan: Hasil penilaian sinergitas oleh Tim Penilai - Interpretasi: Semakin baik indeks sinergitas, maka tata Kelola pemerintah di Kecamatan semakin baik
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	- Konsep: Aplikasi E SUKMA JATIM - Definisi: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang hasilnya diperoleh setiap tribulan, dimana koresponden mengisi link SKM melalui url: https://sukma.jatimprov.go.id/login - Ukuran: Indeks - Satuan: Nilai - Klasifikasi: - - Rumus Perhitungan: Hasil IKM melalui E SUKMA JATIM - Interpretasi : Semakin tinggi IKM, maka masyarakat akan semakin puas dengan kinerja pelayanan di Kecamatan.

3	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	- Konsep: Keterbukaan Informasi Publik - Definisi: Pemantauan dan pengawasan terhadap adanya pelanggaran trantibum - Ukuran: Persentase - Satuan: Persen - Klasifikasi: - - Rumus Perhitungan: (Jumlah pelanggaran tahun lalu-Jumlah pelanggaran tahun ini /Jumlah pelanggaran tahun lalu) x 100% - Interpretasi: Semakin turun pelanggaran, maka suatu wilayah menjadi semakin aman.

Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	85	79.83	93,91%
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Kinerja Tahun 2024**		
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	88	86,74	98,56%
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	9	7 %	77,77%

Data pada table tersebut di atas diperoleh berdasarkan Laporan LKJIP Kecamatan Sukomoro Tahun 2024, dimana terdapat 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, dengan capaian Tujuan sebesar **93,91%** ini didapat dari hasil penilaian Sinergitas Kecamatan sebagaimana surat dari Sekretariat Daerah No. 100/2820/411.000/2024 dengan nilai3.

Sasaran ke-1 yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tahun 2024 terealisasi dengan nilai 86,24 atau dengan kategori "baik" dari target yang ditetapkan 81,5 sehingga persentase capaiannya sebesar 105,82 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah mencapai sasaran. Nilai IKM dapat diperoleh melalui survey kepada masyarakat yang dilakukan setiap Tribulan mulai Tribulan I (periode Januari 2024 s.d Maret 2024) dengan jumlah responden 106 orang, Tribulan II (periode April 2024 s.d. Juni 2024) dengan jumlah responden 125 orang, Tribulan III (periode Juli 2024 s.d. September 2024) dengan jumlah responden 178 orang, dan Tribulan IV (periode Oktober 2024 s.d. Desember 2024) dengan jumlah responden 36 orang. Pelaksanaan survey melalui aplikasi e-SUKMA JATIM yang dapat diisi melalui handphone masing-masing responden.

Sedangkan Sasaran ke-2 yakni Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sukomoro tahun 2024 terealisasi sebesar 31,25 % dari target yang ditetapkan 100% sehingga persentase capaiannya sebesar 31,25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum mencapai target yang diharapkan..

A. Tujuan Kecamatan Sukomoro Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan

Dari penilaian sinergitas kecamatan terealisasi 64,70 dari target sebesar 77. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum mencapai target. Dalam penilaian sinergitas tersebut terdapat 7 aspek, diantaranya sebagai berikjut :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Dalam dalam hasil penilaian sinergitas kinerja kecamatan (SKK) tahun 2024 dari 7 aspek tersebut ada salah satu aspek yang tidak mendapat

nilai pada aspek nomer 5, karena kecamatan Sukomoro pada tahun 2023 belum memiliki inovasi/kreativitas sehingga mempengaruhi hasil nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK).

B. Sasaran strtegis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 94,64 % dari target sebesar 92,00 % . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Sukomoro melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

   Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 98,80 %.

2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

   Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Sukomoro sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 99,34%.

3. Waktu Penyelesaian (U3)

   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 99,60%.

4. Biaya/Tarif (U4)

   Biaya dalam pengurusan surat–surat dan Pelayanan di Keacamatan Sukomoro tidak dikenakab biaya/gratis terealisasi 99,89%.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

   Jenis Pelayanan di Kecamatan Sukomoro antara lain :

   d. Pembuatan Akte Kelahiran
   e. Pembuatan Kartu Keluarga
   f. Perekaman KTP
   g. Pelayanan Pindah tempat
   h. Pembuatan dispensasi nikah
   i. Pembuatan PPAT
   j. Pelayanan Hak Waris
   k. Pelayanan rekomendasi kredit bank
   l. Pelayanan Legalisasi surat surat

Untuk jenis Pelayanan mencapai 99,34%.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 99,45%.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 99,89%.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 99,78%.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Sukomoro sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 99,56%.

   Dengan Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Sukomoro sampai akhir tahun 2024 terealisasi 94,64%. (Bukti Dukung Pada Lampiran 4)

C. Sasaran startegis yang kedua yaitu meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan realisasi sebesar 7,14 % dari target sebesar 9 %. Capaian kinerjanya 79,33 % Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut telah mencapai target.

Angka tersebut dapat diperoleh dari :

Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2023 sejumlah 13 Laporan dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2024 sejumlah 14 Laporan

Dengan demikian realisali Kinerjanya :

$$\frac{14 - 13 = 1}{14} \times 100 = 7{,}14\ \%$$

Sedangkan Capaiannya $= \frac{\text{realisai}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{7{,}14}{9} \times 100 = 79{,}33\ \%$

Capaian kinerjanya sudah tercapai namun masih perlu adanya koordinasi kegiatan penanganan pelanggaran trantibum di kecamatan Sukomoro bersama tokoh masyarakat, perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait

yaitu forpimcam dan perlu untuk secara kontinyu mengadakan sosialisasi tentang trantibum.

Adapaun target yang telah ditentukan terlalu kecil sehingga capaian kinerja terlalu tinggi.

Tabel Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Indikator	Tingkat Kemajuan (%)	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	93,91	Tercapai
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Tingkat Kemajuan (%)**	**Tercapai/ Tidak Tercapai**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	98,56	Tercapai
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	79,33	Tercapai

Dari Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat simpulkan bahwa :

1. Dalam capaian indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2024 sebesar 84,02 dari target 77 maka bisa dikatakan dapat tercapai.
2. Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Sukomoro pada tahun 2024 sebesar 102,86 % dari target 92 % maka dikatakan dapat tercapai. Hal ini dalam capaian kinerja dalam meningkankan pelayanan public dapat dikatakan berhasil. Adapun penyebab keberhasilan dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan :

dengan baik yaitu dengan Motto Pelayanan Kecamatan Sukomoro "MANTAP"

a. Mudah
b. Aman
c. Nyaman
d. Tertib
e. Amanah
f. Profesional

penyebab Keberhasilan dalam pelayanan masyarakat di antaranya :

1. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP
2. Dalam memberikan pelayanan di lakukan dengan senyum, sapa dan sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik
3. Dilakukan komunikasi dengan baik dengan pemohon apabila persyaratan kurang lengkap

3. Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 14,29 % dari target 10 % maka dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai. Penyebab keberhasilan dalam mencipkatan penurunan gangguan trantibun di wilayah Kecamatan Sukomoro dikarenakan terciptanya keharmonisan antara Muspika, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib. Upaya untuk tahun kedepan lebih ditingkatkan lagi dalam menekan gangguan trantibum di wilayah Kecamatan Sukomoro supaya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Tabel Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Ketengan	Faktor Penyebab / Uapaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			77	64,70	84,02%	Penilaian dari Sekda Kab. Nganjuk	-
2	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai SAKIP Kecamatan	**75**	**67,25**	**89,66**	Berita acara penilaian SAKIP	
3			***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun***	***12 Dokumen***	***12 Dokumen***	***100%***	Tercukupinya 12 Laporan di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Jumlah laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar Realisasi	

								Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1. Dokumen Renstra 2024 2. Dokumen Renja 2024 3. Dokumen RKA 4. Dokumen DPA	
5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	1. Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Perangkat Daerah Tribulan I, II, III dan IV Tahun 2024 Kec. Sukomoro	
6			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%	1. Laporan Dokumen LKJiP 2. Laporan Penilaian SAKIP 3. Laporan LKPJ	

								4. Laporan Penilaian Sinergitas	
7			***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***62 Dokumen***	***3 Dokumen***	**41,94%**	Tercukupinya 3 Dokumen di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 2. Jumlah Laporan keungan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Untuk kedepannya akan diperbaiki terkait target yang ditetapkan

8			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/bulan	11 Orang/bulan	46,15%	Daftar Gaji dan penerimaan Gaji masing-masing ASN	Masalah dalam penentuan target, seharusnya sesuai dengan jumlah pegawai yang ada
9			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 Dokumen	-	0%		Tidak direalisasikan karena dalam merencakan tidak memahami tentang kegiatan tersebut. Kedepannya akan diperbaiki dalam menentukan kegiatan maupun tergetnya.
10			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keungan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Laporan penyusunan keuangan akhir tahun 2024	-

11			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100%	1. Laporan rekon bulanan di Bidang Akuntansi 2. Laporan bulanan tentang pembelian/pengadaan barang dan jasa di Bidang Aset	
12			***Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***51 Dokumen***	***2 Dokumen***	***21,56%***	Tercukupinya 2 Dokumen di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
13			Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan senam pagi di kecamatan	

14			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	-	0%		Karena kegiatan di PAK sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Kedepannya akan di perbaiki terkait penentuan kegiatan dan terget
15			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9 orang	50 orang	100%	Laporan kegiatan rapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dalam penentuan target perlu diperbaiki untuk kedepannya sehingga dapat tercapai
16			***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***100%***	Tercukupinya 7 Dokumen di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah paket komponen listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan 2. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 3. Jumlah paket bahan Logistik	

								kantor yang disediakan 4. Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan 5. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dn Konsultasi SKPD 7. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
17			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Paket Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan	
18			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	100%	Paket peralatan dan perlengkapan kantor pembelian bendera dan tali bendera	
19			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket berita acara penyelesaian pengadaan/pembelian (ATK, Kertas, Bahan computer, Perabot kantor,	

								Air mineral dan mamin rapat)	
20			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	0 Paket	0%		Yang dijalankan hanya SPJ ATK. Maka kedepannya akan dilakukan kegiatan pelayanan umum di bidang sarpras se-kecamatan Sukomoro
21			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%	Laporan jumlah tamu yang berkunjung ke Kecamatan Sukomoro dari Kapolres Nganjuk	-
22			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dn Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan perjalanan dinas luar daerah	-

23			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen penataan arsip dinamis SKPD	-
24			***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan***	***14 Unit***	***9 unit***	***64,29%***	Tercukupinya 9 unit di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah paket mebel yang disediakan 2. Jumlah unit perlengkapan dan mesin lainnya yang disediakan	Karena dalam penentuan terget masih salah. Untuk kedepannya akan dilakukan dicermati lagi untuk targetnya.
25			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 Unit	4 unit	47,14%	BAST pengadaan barang : 1. Karpet 2. Kursi rapat 3. Kursi staf 4. Meja rapat	Salah dalam menentukan target perencanaan. Untuk kedepannya akan dicermati lagi dalam penentuan target
26			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlengkapan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	5 unit	71,48%	BAST pengadaan barang : 1. CCTV 2. AC 3. Laptop 4. Komputer 5. Kipas Angin	Salah dalam menentukan target perencanaan. Untuk kedepannya akan dicermati lagi dalam

									penentuan target
27			***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersedianya Jasa Penunjang SKPD***	***24 Laporan***	***24 Laporan***	***100%***	Terpenuhi	-
28			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	Laporan agenda surat keluar dan surat masuk	-
29			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi , sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Laporan rekap jasa air dan listrik	-
30			***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	***12 Unit***	***10 unit***	***83,33%***	Tercukupinya 10 unit di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	

								2. Jumlah Mebel yang Dipelihara 3. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 4. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	
31			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 unit	100%	1. Pemeliharaan mobil Phanter 2. Pemeliharaan sepeda motor supra 3. Pemeliharaan sepeda motor Vixion	
32			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	2 unit	75%	BAST pemeliharaan mebel	Kurang maksimalnya dalam penyerapan anggaran sehingga target sudah ditentukan tidak tercapai. Untuk kedepannya akan dimaksimalkan lagi untuk penyerapa

									n anggaran sehingga targetnya terpenuhi
33			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	3 unit	60%	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara dengan servis seperti : 1. AC 2. Laptop 3. Computer	Kurang maksimalnya dalam penyerapan anggaran sehingga target sudah ditentukan tidak tercapai. Untuk kedepannya akan dimaksimalkan lagi untuk penyerapan anggaran sehingga targetnya terpenuhi
34			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	1 unit	100%	BAST pemeliharaan Gedung kantor berupa pengecatan kantor dan plavon	-
35			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***	**83%**	**85,71%**	**103,26%**		

			DAN PELAYANAN PUBLIK						
36			***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***8 Laporan***	**8 Laporan**	**100%**		
37			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	8 Laporan	100%	1. Laporan kegiatan monitoring pemasukan PBB 2. Laporan kegiatan rapat PBB 3. Laporan kegiatan rapat PUG 4. Laporan kegiatan rapat kemiskinan ekstrim 5. Laporan kegiatan rapat PBB 6. Laporan kegiatan rapat PUG 7. Laporan kegiatan rapat PBB 8. Laporan Hasil Pemasukan PBB	

38			***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	**Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	***3 Dokumen***	**1 Dokumen**	33,33%		
39			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	Dokumen rapat	Didalam kegiatan tersebut hanya ada kegiatan rapat saja
40			***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliompahkan Kepada Camat***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***3 Laporan***	***2 Laporan***	***66,66%***		
41			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	2 laporan	66,66%	1. Laporan kegiatan rapat FKP 2. Laporan kegiatan rapat FGD	Yang di jalankan hanya 2 kegiatan, kedepannya akan di evaluasi untuk targetnya

42			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**85%**	**143%**	143%		
43			***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan***	***97 Lembaga Kemasyarakatan***	***106 Lembaga Kemasyarakatan***	***137,66%***		
44			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	77 *Lembaga Kemasyarakatan*	106 *Lembaga Kemasyarakatan*	137,66%	1. Jumlah Lembaga yang mengikuti rapat musrenbang tingkat kecamatan 2. Laporan kegiatan rapat DTKS	
45			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20 Dokumen	19 Dokumen	95%	1. Dokumen laporan PKK 11 Desa Kecamatan 2. Dokumen laporan PKK Kecamatan 3. Laporan kegiatan rapat UMKM 4. Dokumen laporan kegiatan rapat PKK (Pleno PKK, Rapat Pengurus)	Salah dalam menentukan target perencanaan. Untuk kedepannya akan dicermati lagi dalam penentuan target

46			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 laporan	100%	Laporan penyelesaian penyaluran bantuan kepada balita stunting	-
47	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**66%**	**57,75%**	**87,50%**		
48			***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	***8 Laporan***	***7 Laporan***	**87,50%**		
49			Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	3 Laporan	75%	1. Laporan kegiatan rapat Linmas dilaksanakan 2 kali 2. Laporan kegiatan rapat Sosialisasi Bahaya Narkoba	Kurang maksimalnya dalam penyerapan anggaran sehingga target sudah ditentukan tidak tercapai. Untuk kedepannya akan dimaksimalkan lagi untuk

									penyerapan anggaran sehingga targetnya terpenuhi
50			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan	100%	Laporan kegiatan pengajian	Dalam kegiatan tersebut salah dalam menentukan target. Kedepannya akan dicermati lagi dalam menentukan sebuah terget, sehingga dapat tercapai
51	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**81%**	**49,25%**	**60,80%**		
52			***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	***250 Orang***	***152 orang***	**60,80%**		

53			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	152 orang	60,80%	Daftar Hadir Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Telah mengundang 180 orang akan tetapi yang hadir hanya sampai dengan 152 orang. Kedepannya akan lebih aktif untuk mengajak warga dalam mengikuti pembinaan kebangsaan
54			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**80%**	**81%**	**101,25%**		

55			***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang***	***11 Desa***	***11 Desa***	***100%***		
56			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka administrasi tata Pemerintahan Desa	66 Dokumen	20 Dokumen	30,30%	1. Dokumen kegiatan rapat BPD 2. Dokumen kegiatan rapat operator desa 3. Dokumen kegiatan rapat RAPBdes 4. Dokumen kegiatan rapat APBdes 5. Dokumen kegiatan rapat konferensi perangkat desa 6. Dokumen kegiatan rapat EPDESKEL 7. BA monitoring pembinaan keuangan desa	Dalam kegiatan tersebut Sebagian digunakan untuk kegiatan rapat
57			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	2 dokumen	66,66%	1. Dokumen kegiatan rakor pembangunan sarpras desa (Aset Desa) 2. Dokumen kegiatan rapat profil desa	Dalam kegiatan terebut hanya digunakan untuk kegiatan rapat saja

								3. Dokumen kegiatan rapat RKPDes	

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sukomoro adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Sukomoro.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Sukomoro dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas melakukan koordinasi dan fasilitasi.

2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukomoro menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/ *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Sukomoro adalah Kecamatan dengan Tipe A. Selain itu juga didasarkan pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Nganjuk ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Sukomoro;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Sukomoro yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;

6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukomoro, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi

pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya,

b. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya Kecamatan Sukomoro, yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Sukomoro, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.
3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*

   Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Sukomoro guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan

program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

5) *Keamanan dan Ketertiban di Wilayah*

Masih tingginya angka kriminalitas dan masih rendahnya keterlibatan semua pihak baik masyarakat, polisi, dan kecamatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan menjadi faktor penting untuk menurunkan angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Tabel 2.21.

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta ketenteraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya Sinegi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih transpara, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat	Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	• Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. • Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. • Pelayanan Prima. • Peningkatan Sinergitas Kecamatan. • Keamanan dan Ketertiban di Wilayah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukomoro dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Sukomoro adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan* yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Nilai Sinergitas Kecamatan.*

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh

Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local;
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;
7. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local.

Sedangkan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 adalah Nganjuk Melesat 2025-2030, antara lain :

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
4. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup

12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Kecamatan Sukomoro sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Sukomoro dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua) yakni Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Sukomoro memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1. berikut:

3.1. Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Sukomoro											
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sukomoro		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	79,83	82.70	82.90	83.10	83.87	84.40	86.65	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Sukomoro	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	86,84	87	88.40	88.50	88.75	89	89.25	
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Sukomoro	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	7	4	4	4	4	4	4	
		Meningkatnya tertib administrasi desa di Kecamatan Sukomoro	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	80	82	85	87	89	91	94	

3.2 Statrategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Sukomoro dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Sukomoro, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
3. Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
10. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.
11. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
12. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM
13. Meningkatkan Inovasi/kreativitas kecamatan pada segala aspek

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang baik dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	
			- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi	

			dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah - Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM - Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	

			- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan	
			Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sukomoro selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sukomoro. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sukomoro akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					6.730.049.298		7.045.648.154		7.111.590.154		7.220.843.200		7.350.842.600	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.170.747.702		5.190.747.700		5.190.747.700		5.200.000.146		5.230.000.146	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	69,4	71,65	5.170.747.702	72,4	5.190.747.700	73	5.190.747.700	74	5.200.000.146	75	5.230.000.146	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	69,4	71,65		72,4		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	69,4	71,65		72,4		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					43.600.000		83.600.000		98.542.000		98.542.600		98.542.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	80	10.450.000	81	20.450.000	82	20.450.000	83	20.450.000	84	20.450.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di ecamatan (%)	79,83	79,83	80	18.500.000	81	28.500.000	82	28.500.000	83	28.500.000	84	28.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum diKecamatan (%)	79,3	79,3	80	14.650.000	81	34.650.000	82	49.592.000	83	49.592.600	84	49.592.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.125.283.142		1.321.882.000		1.421.882.000		1.521.882.000		1.621.882.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,34	88,4	1.125.283.142	88,5	1.321.882.000	88,75	1.421.882.000	89	1.521.882.000	89,25	1.621.882.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,34	88,4		88,5		88,75		89		89,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,34	88,4		88,5		88,75		89		89,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					30.450.000		60.450.000		60.450.000		60.450.000		60.450.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	40	40	100	20.450.000	100	30.450.000	100	30.450.000	100	30.450.000	100	30.450.000	Dinas/Badan yang enangani Bidang Kecamatan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sukomoro selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sukomoro. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sukomoro akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					6.730.049.298		7.046.648.154		7.111.590.154		7.220.843.200		7.350.842.600	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.170.747.702		5.190.747.700		5.190.747.700		5.200.000.146		5.230.000.146	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	69,4	71,85	5.170.747.702	72,4	5.190.747.700	73	5.190.747.700	74	5.200.000.146	75	5.230.000.146	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	69,4	71,85		72,4		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	69,4	71,85		72,4		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					43.600.000		83.600.000		98.542.000		98.542.600		98.542.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	80	10.450.000	81	20.450.000	82	20.450.000	83	20.450.000	84	20.450.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di ecamatan (%)	79,83	79,83	80	18.500.000	81	28.500.000	82	28.500.000	83	28.500.000	84	28.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum diKecamatan (%)	79,3	79,3	80	14.650.000	81	34.650.000	82	49.592.000	83	49.592.600	84	49.592.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.125.283.142		1.321.882.000		1.421.882.000		1.521.882.000		1.621.882.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,34	88,4	1.125.283.142	88,5	1.321.882.000	88,75	1.421.882.000	89	1.521.882.000	89,25	1.621.882.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,34	88,4		88,5		88,75		89		89,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,34	88,4		88,5		88,75		89		89,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					30.450.000		60.450.000		60.450.000		60.450.000		60.450.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	40	40	100	20.450.000	100	30.450.000	100	30.450.000	100	30.450.000	100	30.450.000	Dinas/Badan yang enangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	40	40	100	10.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					205.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	40	40	100	205.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					154.968.454		164.968.454		114.968.454		114.968.454		114.968.454	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Sukomoro	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	80	138.492.454	85	148.492.454	87	98.492.454	88	98.492.454	89	98.492.454	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukomoro	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	80	16.476.000	85	16.476.000	87	16.476.000	88	16.476.000	90	16.476.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					6730049298.00		7046648154.00		7111590154.00		7220843200.00		7350842600.00	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Sukomoro							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sukomoro				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sukomoro			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Kecamatan Sukomoro yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaah yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Kecamatan Sukomoro yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Sukomoro		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Tersusunya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sukomoro yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Sukomoro		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Tersusunnya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
		Meningkatnya tertib administrasi desa di Kecamatan Sukomoro			Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Sukomoro		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksanya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Sukomoro yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukomoro		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksanya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukomoro yang optimal dan responsif	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
		Meningkatkan Ketrentaman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Sukomoro			Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)		
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sukomoro		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sukomoro yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sukomoro		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksanya Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sukomoro sesuai Substansi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Sukomoro		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksanya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Sukomoro yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.23.0001 - Kelurahan Sukomoro							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sukomoro	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sukomoro	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kelurahan Sukomoro Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kelurahan Sukomoro Yang Tepat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Kelurahan Sukomoro Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kelurahan Sukomoro Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Kelurahan Sukomoro Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kelurahan Sukomoro Yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana yang efektivitas dan efisiensi di Kelurahan Sukomoro	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.23.0002 - Kelurahan Kapas							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sukomoro	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sukomoro	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Data Perangkat Daerah Kelurahan Kapas yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kelurahan Kapas Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kelurahan Kapas Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Kelurahan Kapas yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai Kelurahan Kapas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Kelurahan Kapas yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tertaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kelurahan Kapas Yang Layak Pakai	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana yang efektivitas dan efisiensi di Kelurahan Kapas	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Polmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Polmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Polmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Polmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				6.730.049.298		7.046.648.154		7.111.590.154		7.220.843.200		7.350.842.600		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.170.747.702		5.190.747.700		5.190.747.700		5.200.000.146		5.230.000.145		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	71,85	5.170.747.702	72,4	5.190.747.700	73	5.190.747.700	74	5.200.000.146	75	5.230.000.145	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Sukomoro	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.000.000	3	2.500.000	2	3.000.000	2	3.000.000	3	3.500.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.000.000	3	2.500.000	2	3.000.000	2	3.000.000	3	3.500.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.568.519.098,04		3.268.064.850		3.139.514.300		3.124.596.746		3.127.546.746		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	10	10	3.568.519.098,04	10	3.268.064.850	10	3.139.514.300	10	3.124.596.746	10	3.127.546.746		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26		26		26		26		26			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.548.529.098,04		3.228.074.850		3.099.524.300		3.084.606.746		3.087.556.746		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26	3.548.529.098,04	26	3.228.074.850	26	3.099.524.300	26	3.084.606.746	26	3.087.556.746		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.760.000		30.760.000		30.760.000		30.760.000		30.760.000		

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	30.780.000	12	30.780.000	12	30.780.000	12	30.780.000	12	30.780.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	10	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.210.000		5.210.000		5.210.000		5.210.000		5.210.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	5.210.000	18	5.210.000	18	5.210.000	18	5.210.000	18	5.210.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18	18	6.000.000	18	6.000.000	18	6.000.000	18	6.000.000	18	6.000.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18	18	6.000.000	18	6.000.000	18	6.000.000	18	6.000.000	18	6.000.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.800.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		
Tersusunnya Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	30	30.800.000	30	57.000.000	30	57.000.000	30	57.000.000	30	57.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5			5		5		5		5			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	25	25		25		25		25		25			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	25	25	0	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				28.800.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	30	28.800.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000		

7.01.01.2.06.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				102.365.000		109.300.000		109.900.000		110.500.000		110.600.000	
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Kecamatan Sukomoro yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	102.365.000	12	109.300.000	12	109.900.000	12	110.500.000	12	110.600.000	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.639.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	4.639.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.586.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1.586.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	5.400.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.760.000		23.800.000		23.900.000		24.000.000		24.100.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6	23.760.000	6	23.800.000	6	23.900.000	6	24.000.000	6	24.100.000	
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		4.500.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	4.500.000	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				24.918.403,96		29.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4	24.918.403,96	4	29.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	10		10		10		10		10		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				8.067.500		9.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4	8.067.500	4	9.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.850.903,96		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	10	16.850.903,96	10	20.000.000	10	30.000.000	10	40.000.000	10	50.000.000	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				234.672.000		238.000.000		238.000.000		238.000.000		238.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Kecamatan Sukomoro yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	234.672.000	12	238.000.000	12	238.000.000	12	238.000.000	12	238.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	0	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				198.672.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	198.672.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.693.000		134.000.000		145.000.000		155.000.000		155.000.000	

Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro yang Layak Pakai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	71.693.000	50	134.000.000	50	145.000.000	50	155.000.000	50	155.000.000		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3			3		3		3		3			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		35.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		25.000.000	3	35.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	30	3.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.190.000		14.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	13.190.000	50	14.000.000	50	15.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.503.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	7	30.503.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	71,85	5.170.747.702	72,4	5.190.747.700	73	5.190.747.700	74	5.200.000.145	75	5.230.000.146	7.01.0.00.0.00.23.0001 - Kelurahan Sukomoro	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				38.260.000		38.260.000		38.260.000		38.260.000		38.260.000		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kelurahan Sukomoro Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	38.260.000	12	38.260.000	12	38.260.000	12	38.260.000	12	38.260.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				37.260.000		37.260.000		37.260.000		37.260.000		37.260.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	37.260.000	12	37.260.000	12	37.260.000	12	37.260.000	12	37.260.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kelurahan Sukomoro Yang Tepat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				44.849.600		44.849.600		44.849.600		44.849.600		44.849.600		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Kelurahan Sukomoro Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	44.849.600	1	44.849.600	1	44.849.600	1	44.849.600	1	44.849.600		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.472.800		1.472.800		1.472.800		1.472.800		1.472.800		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	1.472.800	12	1.472.800	12	1.472.800	12	1.472.800	12	1.472.800		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.005.500		2.005.500		2.005.500		2.005.500		2.005.500		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2.005.500	1	2.005.500	1	2.005.500	1	2.005.500	1	2.005.500		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.137.900		31.137.900		31.137.900		31.137.900		31.137.900		

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	31.137.900	1	31.137.900	1	31.137.900	1	31.137.900	1	31.137.900		
7.01.01.2.05.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.079.100		4.079.100		4.079.100		4.079.100		4.079.100		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.079.100	1	4.079.100	1	4.079.100	1	4.079.100	1	4.079.100		
7.01.01.2.05.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.520.000		2.520.000		2.520.000		2.520.000		2.520.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	2.520.000	12	2.520.000	12	2.520.000	12	2.520.000	12	2.520.000		
7.01.01.2.05.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.634.300		3.634.300		3.634.300		3.634.300		3.634.300		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	3.634.300	1	3.634.300	1	3.634.300	1	3.634.300	1	3.634.300		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				313.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kelurahan Sukomoro Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	313.000.000	1	340.000.000	1	340.000.000	1	340.000.000	1	340.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1	13.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.585.000		65.585.000		65.585.000		65.585.000		65.585.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Kelurahan Sukomoro Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	65.585.000	12	65.585.000	12	65.585.000	12	65.585.000	12	65.585.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				51.585.000		51.585.000		51.585.000		51.585.000		51.585.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	51.585.000	12	51.585.000	12	51.585.000	12	51.585.000	12	51.585.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				37.766.800		83.766.800		133.766.800		103.766.800		97.766.800		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kelurahan Sukomoro Yang Layak Pakai	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5	37.766.800	5	83.766.800	5	133.766.800	5	103.766.800	5	97.766.800		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				6.456.800		6.456.800		6.456.800		6.456.800		6.456.800		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendarsan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	4	6.456.800	4	6.456.800	4	6.456.800	4	6.456.800	4	6.456.800		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.320.000		4.320.000		4.320.000		4.320.000		4.320.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	4.320.000	5	4.320.000	5	4.320.000	5	4.320.000	5	4.320.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.990.000		70.990.000		120.990.000		90.990.000		84.990.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	24.990.000	2	70.990.000	2	120.990.000	2	90.990.000	2	84.990.000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,4	71,85	5.170.747.702	72,4	5.190.747.700	73	5.190.747.700	74	5.200.000.146	75	5.230.000.146	7.01.0.00.0.00.23.0002 - Kelurahan Kapas	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Data Perangkat Daerah Kelurahan Kapas yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				38.280.000		38.280.000		38.380.000		38.380.000		38.430.000		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kelurahan Kapas Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	38.280.000	4	38.280.000	4	38.380.000	4	38.380.000	4	38.430.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35.580.000		35.580.000		35.580.000		35.580.000		35.580.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	35.580.000	12	35.580.000	12	35.580.000	12	35.580.000	12	35.580.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.700.000		2.700.000		2.800.000		2.800.000		2.850.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	2.700.000	4	2.700.000	4	2.800.000	4	2.800.000	4	2.850.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		6.000.000		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kelurahan Kapas Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6	3.000.000	6	3.500.000	6	4.000.000	6	4.500.000	6	6.000.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		6.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6	3.000.000	6	3.500.000	6	4.000.000	6	4.500.000	6	6.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.595.450		86.249.450		88.000.000		88.850.000		89.200.000		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Kelurahan Kapas yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	8.559.450	1	8.624.950	1	8.800.000	1	8.885.000	1	8.920.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.662.000		1.700.000		1.700.000		1.750.000		1.800.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.662.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.750.000	1	1.800.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.760.000		1.800.000		1.850.000		1.900.000		2.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1.760.000	1	1.800.000	1	1.850.000	1	1.900.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				53.049.450		53.049.450		54.100.000		54.200.000		54.300.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	53.049.450	12	53.049.450	12	54.100.000	12	54.200.000	12	54.300.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.364.000		2.400.000		2.450.000		2.500.000		2.500.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	2.364.000	1	2.400.000	1	2.450.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.760.000		23.800.000		23.900.000		24.000.000		24.100.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6	23.760.000	6	23.800.000	6	23.900.000	6	24.000.000	6	24.100.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		4.500.000		
Terlaksananya Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	4.500.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				318.225.350		355.000.000		370.000.000		405.000.000		420.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai Kelurahan Kapas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	318.225.350	2	355.000.000	2	370.000.000	2	405.000.000	2	420.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.225.350		45.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	8.225.350	3	45.000.000	3	50.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.272.000		211.392.000		213.392.000		214.512.000		214.512.000		

Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Kelurahan Kapas yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	111.272.000	12	211.392.000	12	213.392.000	12	214.512.000	12	214.512.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.000.000		12.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				97.272.000		197.392.000		197.392.000		197.512.000		197.512.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	97.272.000	12	197.392.000	12	197.392.000	12	197.512.000	12	197.512.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.926.000		69.000.000		105.100.000		101.200.000		106.750.000		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kelurahan Kapas Yang Layak Pakai	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	3	4	42.926.000	4	69.000.000	4	105.100.000	4	101.200.000	4	106.750.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	24		27		30		30		31			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	18		20		23		25		27			
7.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				12.766.000		13.000.000		13.100.000		13.200.000		13.250.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	3	4	12.766.000	4	13.000.000	4	13.100.000	4	13.200.000	4	13.250.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	24	2.000.000	27	2.500.000	30	3.000.000	30	3.500.000	31	4.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.160.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	18	3.160.000	20	3.500.000	23	4.000.000	25	4.500.000	27	5.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		50.000.000		85.000.000		80.000.000		84.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	85.000.000	1	80.000.000	1	84.500.000		

7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				43.600.000		83.900.000		98.542.000		98.542.600		98.542.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	79,83	80	18.500.000	81	28.500.000	82	28.500.000	83	28.500.000	84	28.500.000	7.01.0.00.0.00.23.00.00 - Kecamatan Sukomoro	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				18.500.000		28.500.000		28.500.000		28.500.000		28.500.000		
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan ke Kecamatan Sukomoro sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	79,83	80	18.500.000	81	28.500.000	82	28.500.000	83	28.500.000	84	28.500.000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				18.500.000		28.500.000		28.500.000		28.500.000		28.500.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	79,83	80	18.500.000	81	28.500.000	82	28.500.000	83	28.500.000	84	28.500.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	79,3	80	14.650.000	81	34.650.000	82	49.592.000	83	49.592.600	84	49.592.000		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				14.650.000		34.650.000		49.592.000		49.592.600		49.592.000		
Tersusunnya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	79,83	80	14.650.000	81	34.650.000	82	49.592.000	83	49.592.600	84	49.592.000		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				14.650.000		34.650.000		49.592.000		49.592.600		49.592.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	79,83	80	14.650.000	81	34.650.000	82	49.592.000	83	49.592.600	84	49.592.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	80	10.450.000	81	20.450.000	82	20.450.000	83	20.450.000	84	20.450.000		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.450.000		20.450.000		20.450.000		20.450.000		20.450.000		
Tersusunya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sukomoro yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	79,83	80	10.450.000	81	20.450.000	82	20.450.000	83	20.450.000	84	20.450.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.450.000		20.450.000		20.450.000		20.450.000		20.450.000		

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	79,83	80	10.450.000	81	20.450.000	82	20.450.000	83	20.450.000	84	20.450.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.125.283.142		1.321.882.000		1.421.882.000		1.521.882.000		1.621.882.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,4	1.125.283.142	88,5	1.321.882.000	88,75	1.421.882.000	89	1.521.882.000	89,25	1.621.882.000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Sukomoro	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				58.900.000		105.800.000		105.800.000		110.800.000		115.800.000		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro yang tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	58.900.000	1	105.800.000	1	105.800.000	1	110.800.000	1	115.800.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				32.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	32.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				18.800.000		20.800.000		20.800.000		25.800.000		30.800.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12	12	18.800.000	12	20.800.000	12	20.800.000	12	25.800.000	12	30.800.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.100.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	8.100.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88,34	88,4	1.125.283.142	88,5	1.321.882.000	88,75	1.421.882.000	89	1.521.882.000	89,25	1.621.882.000	7.01.0.00.0.00.23.0001 - Kelurahan Sukomoro	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				516.737.142		577.700.000		627.700.000		657.700.000		677.700.000		

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana yang efektivitas dan efisiensi di Kelurahan Sukomoro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7	7	516.737.142	7	577.700.000	7	627.700.000	7	657.700.000	7	677.700.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3		4		3		4		4				
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5		5		5		5		5				
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	5.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				290.000.000		335.000.000		385.000.000		415.000.000		435.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3	290.000.000	4	335.000.000	3	385.000.000	4	415.000.000	4	435.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				220.068.345		226.000.000		226.000.000		226.000.000		226.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7	7	220.068.345	7	226.000.000	7	226.000.000	7	226.000.000	7	226.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				1.668.797		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	1.668.797	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	88.34	88.4	1.125.283.142	88.5	1.321.882.000	88.75	1.421.882.000	89	1.521.882.000	89.25	1.621.882.000	7.01.0.00.0.00.23.0002 - Kelurahan Kapas	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				549.646.000		638.382.000		688.382.000		753.382.000		828.382.000		
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana yang efektivitas dan efisiensi di Kelurahan Kapas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12	549.646.000	12	638.382.000	12	688.382.000	12	753.382.000	12	828.382.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3		4		3		4		4				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7.546.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	7.546.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				300.000.000		351.282.000		391.232.000		446.232.000		511.182.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3	300.000.000	4	351.282.000	3	391.232.000	4	446.232.000	4	511.182.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				240.000.000		270.000.000		280.000.000		290.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12	240.000.000	12	270.000.000	12	280.000.000	12	290.000.000	12	300.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				2.100.000		2.100.000		2.150.000		2.150.000		2.200.000		
Terlaksananya Evalusi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	2.100.000	1	2.100.000	1	2.150.000	1	2.150.000	1	2.200.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.450.000		60.450.000		60.450.000		60.450.000		60.450.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	40	100	10.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Sukomoro	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksanya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Sukomoro yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	10.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	10.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	40	100	20.450.000	100	30.450.000	100	30.450.000	100	30.450.000	100	30.450.000		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				20.450.000		30.450.000		30.450.000		30.450.000		30.450.000		

Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sukomoro yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	20.450.000	12	30.450.000	12	30.450.000	12	30.450.000	12	30.450.000	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20.450.000		30.450.000		30.450.000		30.450.000		30.450.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	20.450.000	12	30.450.000	12	30.450.000	12	30.450.000	12	30.450.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				205.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelanggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sukomoro	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	40	100	205.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Sukomoro
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				205.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	
Terlaksanya Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sukomoro sesuai Substansi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	100	205.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				205.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	100	205.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				154.968.454		154.968.454		114.968.454		114.968.454		114.968.454	

Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Sukomoro	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	138.492.454	85	148.492.454	87	98.492.454	88	98.492.454	89	98.492.454	7.01.0.00.0.00.23.00.00 - Kecamatan Sukomoro	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				154.968.454		164.968.454		114.968.454		114.968.454		114.968.454		
Terlaksanya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Sukomoro yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	10	10	138.492.454	10	148.492.454	10	98.492.454	10	98.492.454	10	98.492.454		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	80	85		87		89		91		94			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				118.492.454		128.492.454		78.492.454		78.492.454		78.492.454		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	80	85	118.492.454	87	128.492.454	89	78.492.454	91	78.492.454	94	78.492.454		
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukomoro	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	16.476.000	85	16.476.000	87	16.476.000	88	16.476.000	90	16.476.000		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				154.968.454		164.968.454		114.968.454		114.968.454		114.968.454		
Terlaksanya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukomoro yang optimal dan responsif	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	10	10	16.476.000	10	16.476.000	10	16.476.000	10	16.476.000	10	16.476.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6.476.000		6.476.000		6.476.000		6.476.000		6.476.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	10	6.476.000	10	6.476.000	10	6.476.000	10	6.476.000	10	6.476.000		

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Sukomoro										
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	79,83	82,7	82,9	83,1	83,87	84,4	86,65	

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Sukomoro				
1.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sukomoro	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.23.0001 - Kelurahan Sukomoro				
2.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
3.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.23.0002 - Kelurahan Kapas				
4.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukomoro	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Sukomoro menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Sukomoro yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Sukomoro terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Sukomoro									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	79,83	82,7	82,9	83,1	83,87	84,4	86,65	
3.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	80	82	85	87	89	91	94	
4.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	7	4	4	4	4	4	4	
5.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	86,84	87	88,4	88,5	88,75	89	89,25	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Renstra Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	positif	Nilai	79,83	82,7	82,9	83,1	83,87	84,4	86,65	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Sukomoro.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001